

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam mengembangkan industri otomotifnya hingga kini Vietnam menjadi negara ke 4 di Asia tenggara yang mampu memproduksi mobil pada tahun 2017, tercatat sepanjang tahun 2017 Vietnam memproduksi mobil sebanyak 195.937 unit (Priyanto, 2018). Produk otomotif merupakan produk unggulan bagi Vietnam meskipun terdapat produksi-produksi lainnya seperti perikanan, pertanian, manufaktur, bahan-bahan mentah. Vietnam ingin industri otomotifnya memperoleh 35-40% komponen sendiri pada tahun 2020 naik 10% dari tahun 2018 (Onishi, 2019). Namun pemerintah Vietnam merasa kurang dalam pengembangan industri otomotif karena ke kurangan produksi di bidang bahan baku, teknologi, dan mahalanya biaya impor dalam suku cadang.

Pada 1 Januari 2018 pemerintah Vietnam mengeluarkan kebijakan baru yaitu *Prime Minister Decree No. 116/2017 (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import of Motor Vehicle and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services)* dan *Circular No. 03/2018 (Regulation on the Checking on Imported Automobiles for Technical Safety and Environmental Protection)* (thuvienphapluat, 2018). Peraturan baru tersebut menghambat pengekspor mobil ke negara Vietnam karena harus melakukan uji tipe. kebijakan

*Decree No.116/2017* berlaku pada 1 Januari 2018 bersamaan dengan kebijakan ASEAN dalam perdagangan bebas, dan akan diberlakukan pembebasan tarif impor dari negara-negara anggota ASEAN menjadi pajak 0% untuk *Completely Built Unit (CBU)*, dalam kebijakan tersebut berisi tentang peraturan ketat seperti perakitan, pembuatan mobil, serta para eksportir mobil harus memiliki sertifikasi *VTA (Vehicle Type Approval)* sehingga dalam setiap mobil yang di impor ke negara Vietnam akan diperiksa dan menjalani tes untuk melihat kelayakan mesin dan kualitas mobil dalam keamanan, serta kualitas kendaraan.

Peraturan baru tersebut sangat mengganggu perekonomian negara yang bekerja sama dengan Vietnam dalam hal otomotif seperti Indonesia, dimana Indonesia sendiri setiap tahunnya mampu mengekspor mobil ke Vietnam dengan jumlah yang sangat besar sekitar 30.000-40.000 unit mobil, selain itu terhambatnya ekspor mobil ke Vietnam dengan adanya peraturan tersebut mempengaruhi standar SNI milik Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan standar di negara Vietnam (Fauzie, 2018). Vietnam merupakan pasar yang sangat strategis bagi Indonesia sebab banyak mobil buatan Indonesia di ekspor ke Vietnam, dalam segi ekonomi Vietnam merupakan sumber pendapatan bagi PDB Indonesia dan memiliki prospek yang menjanjikan serta potensi memadai yang dimiliki Indonesia mampu mengembangkan industri otomotif, kendala impor yang dibuat oleh Vietnam sangat mengganggu kerjasama bilateral dengan Indonesia yang sudah terjalin sejak lama pada tahun 1955 yang ingin meningkatkan kerjasama

perdagangan serta mampu mengganggu ASEAN untuk mewujudkan visi dan misinya yaitu menjaga perdamaian dan stabilitas dalam kawasan Asia Tenggara (Aria, 2017).

Dengan demikian, Indonesia mampu mengekspor mobil ke Vietnam dengan jumlah yang sangat besar pertahunnya. Namun, pada periode Januari-Juli 2018 bersamaan dengan kebijakan baru yang di keluarkan pemerintah Vietnam menghambat pekeksporan mobil ke negara tersebut, untuk mobil-mobil yang telah sampai di Vietnam masih belum jelas kondisinya karena terhalang oleh peraturan baru yang dikeluarkan oleh Vietnam. Mobil-mobil tersebut tertahan di pelabuhan untuk menjalani berbagai tes kelayakan dan membuat biaya tambahan (Yolanda, 2018). Oleh karena itu, dengan adanya kendala ini selain kehilangan pemasukan yang cukup besar dari pelarangan ekspor mobil ke Vietnam, juga diperlukan peran pemerintah untuk mencari jalan keluar agar mampu mengekspor kembali ke negara Vietnam mengingat bahwa banyak industri otomotif indonesia yang di ekspor ke negara-negara Asia Tenggara terutama Vietnam. Sehingga dalam hal ini, Indonesia menghadapi hambatan ekspor mobil oleh pemerintah Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2017-2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dijelaskan bahwa keputusan Vietnam mengeluarkan *Decree No.116/2017* pada bulan November tahun 2017

mengancam para negara yang melakukan ekspor industri mobil. Di mana kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 2018 bersamaan dengan kebijakan ASEAN dalam perdagangan bebas. Kebijakan tersebut terkait diberlakukannya pembebasan tarif impor dari negara-negara anggota ASEAN menjadi pajak 0-5%. Namun keputusan pemerintah Vietnam terkait kebijakan impor mobil ke negara mereka memicu kekhawatiran terhadap Indonesia karena Vietnam sendiri merupakan pasar ekspor otomotif bagi Indonesia. Sehingga penulis dalam penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: **Bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor oleh Vietnam untuk komoditas mobil pada tahun 2017-2019?**

### 1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis, dan memaparkan, terkait strategi Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor mobil oleh pemerintah Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2017-2019 dengan menggunakan teori *Developmental State*.

### 1.4 Signifikansi Penelitian

Topik dari Skripsi ini cukup penting untuk diteliti dan masih belum banyak dibahas, sebab kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Vietnam pada 1 Januari 2018 bersamaan dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) atau perdagangan bebas ini cukup mengkhawatirkan negara-negara yang pemasukan PDBnya melalui

industri otomotif terutama mobil seperti Indonesia, yang mana tujuan utama ekspor mobil mereka ke negara Vietnam. Kebijakan tersebut memiliki kompleksitas mulai dari dalam Domestik hingga Internasional, banyaknya hambatan dari dalam negeri hingga luar negeri membuat kebijakan tersebut banyak mendapat pertentangan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan bagaimana strategi untuk menghadapi kebijakan Vietnam tersebut khususnya dari negara Indonesia agar kendala yang dihadapi bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan dan sama-sama menguntungkan. Maka dari itu penulis akan memfokuskan strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan Vietnam terkait *Decree No.116/2017* pada era Joko Widodo sebagai variabel yang dianalisis dalam perspektif *Developmental State*.

### **1.5 Cakupan Penelitian**

Kajian dalam topik ini merupakan kajian baru yang belum banyak di bahas pada tahun 2017-2019. Pemilihan tahun 2017-2019 didasari dengan isu permasalahan yang di alami Indonesia terkait hambatan ekspor mobil ke negara Vietnam. Sehingga menurut penulis, dengan pemilihan tahun tersebut merupakan pemilihan yang tepat sehingga pembahasan dalam skripsi ini tidak melebar lebih jauh dari topik yang akan di bahas. kajian ini akan menganalisis Bagaimana peran pemerintah Indonesia menghadapi kebijakan baru Vietnam agar tidak terjadi hambatan dalam industri otomotif khususnya mobil. Adapun hal lainnya yang penting untuk diketahui oleh penulis akan dilakukan agar mampu

menginterpretasikan hasil penelitiannya sesuai dengan pokok permasalahan terhadap objek yang ingin diamati.

## 1.6 Kajian Pustaka

Penulis dalam penelitian ini melakukan kajian kepustakaan dengan bersumberkan dari berbagai referensi terkait kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Vietnam pada bidang otomotif, diantaranya sebagai berikut:

Pada literatur yang berjudul “*Dinamika Struktur-Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia*” (Adnan, 2014), membahas terkait perkembangan industri otomotif antara pengusaha dan kekuasaan pada masa Orde Baru. Dinamika dalam industri otomotif yang pada berkaitan erat dengan konteks sosial, ekonomi-politik yang berkembang. Di mana ketika militer mendominasi pada era orde baru, industri otomotif juga turut didominasi oleh kekuatan militer. Demikian pula ketika didominasi oleh kelompok lain atau kekuatan lain, maka industri otomotif juga didominasi oleh kelompok atau kekuatan tersebut.

Ketika industri otomotif melibatkan militer yang mendukung pemerintahan orde baru di mana pada akhirnya berseberangan dengan pemerintah. Maka dengan hal tersebut, keterlibatan militer dalam industri otomotif juga mengalami penurunan. Kemudian keterlibatan pengusaha-pengusaha etnis Cina dalam membangun industri otomotif di Indonesia. Pengusaha-pengusaha tersebut berhasil mengembangkan bisnisnya dengan membangun kedekatan khusus dengan para elit

pada waktu itu yang menyebabkan adanya pengaruh terhadap industri otomotif. Selanjutnya adanya peran kelompok islam modernis yang mendominasi industri otomotif mulai menyurutkan kelompok militer dan etnis Cina. Sehingga memiliki pengaruh dan mendominasi industri otomotif di Indonesia.

Literatur yang berjudul “*Analisis Daya Saing dan Kesiapan Indonesia Dalam Rangka Integrasi ASEAN: Studi Kasus Automotives, Rubber Based, dan Agro Based Product*” (Arianti & Lubis, 2011), membahas terkait industri otomotif, bahan baku karet, dan *agro based product* Indonesia merupakan sektor penggerak perekonomian ASEAN. Namun di sini industri otomotif Indonesia memiliki tingkat integrasi yang sedang untuk pasar otomotif pada pasar dunia. Sehingga industri otomotif Indonesia memiliki daya saing untuk produk-produknya hampir di seluruh negara ASEAN. Di mana artinya liberalisasi yang dilakukan oleh Indonesia pada industri otomotif meningkatkan daya saing dengan negara-negara ASEAN.

Literatur selanjutnya berjudul “*Peningkatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam*” (Lisbet, 2017), membahas terkait pentingnya peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Vietnam. Sebab peningkatan kerja sama ini memiliki arti penting bagi kedua negara. Indonesia menganggap penting Vietnam dan begitu juga sebaliknya. Arti penting kerja sama ini menjadi acuan bagi kedua negara karena dalam kerja sama bilateral ini mencapai perdagangan sebesar 10 miliar USD pada tahun 2018. Sehingga pemerintah dan komunitas usaha dari kedua negara didorong untuk aktif menjalin pertukaran informasi, promosi

investasi, dan konektivitas badan usaha agar dapat mengoptimalkan berbagai potensi peluang kerja sama dari kedua negara ini.

Pada literatur yang berjudul “*An Assessment of the Potential Economic Impact of RCEP on Viet Automobile Sector*” (Anh, Ngoc, & Hurong, 2017), membahas terkait dampak dari perjanjian perdagangan ASEAN+6 tentang industri mobil Vietnam. Dalam literatur ini menjelaskan bahwa industri mobil Vietnam bersaing dengan Thailand, Indonesia, dan negara-negara ASEAN serta Tiongkok, Jepang, dan Korea. Selain itu, dalam literatur ini dijelaskan juga bahwa pasar mobil di Vietnam memiliki dua segmen utama, yaitu *Completely knocked Down* (CKD) dan *Completely Bulid Up* (CBU). Kendaraan CKD merupakan kendaraan yang dirakit di Vietnam atau dirakit secara lokal dengan menggunakan semua bagian utama, komponen, dan teknologi yang berasal dari impor negara asalnya. Sedangkan kendaraan CBU merupakan kendaraan yang sepenuhnya dirakit di luar Vietnam.

Pada literatur selanjutnya berjudul “*Reforming Automobile Excise Taxes in the ASEAN Region for Pro-growth and Pro-Environment Outcomes*” (Preece, 2016), membahas terkait hadirnya MEA dalam kawasan ASEAN berdampak signifikan terhadap penstabilan ekonomi negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Adanya MEA mereformasi kebijakan negara masing-masing untuk mendukung pengimplementasian MEA menjadi basis produksi dan pasar tunggal dalam kawasan secara global. Tidak terkecuali Vietnam pada tahun 2015



mengeluarkan keputusan 108/2015/ ND-CP untuk penyesuaian tarif bea cukai dan pajak terhadap perakitan dan impor mobil sesuai dengan kriteria. Sehingga Vietnam dan negara-negara ASEAN berupaya membangun pasar tunggal yang merupakan peluang bagi industri dalam membangun dan menjual produk industri termasuk otomotif.

Pada literatur yang berjudul *“Host-Site Institutions, Regional Production Linkages and Technological Upgrading: A Study of Automotive Firms in Vietnam”* (Nguyen, Nguyen, Nguyen, & Nguyen, 2016) membahas terkait industri otomotif Vietnam yang sedang dalam tahap upgrade teknologi yang mana dalam negerinya Vietnam telah memiliki industri dalam perakitan mobil dan memiliki OEM (*original equipment manufacturing*) untuk mobil keluaran negara mereka yang bermerk Thanh Cong dan Vinaxuki yang mana mobil ini dirakit bersama perusahaan swasta serta perusahaan pemerintah BUMN, selain itu Vietnam juga memiliki pemasok komponen seperti ban yang dimiliki perusahaan Kumho and Da Nang Rubber Company, Dap Cau Glass yang memproduksi kaca mobil and Dong Nai Battery Company yang memproduksi batrai. Tetapi seperti dalam kasus kaca mobil pemerintah lebih memilih impor karena memiliki kualitas yang lebih baik serta perusahaan yang memproduksi komponen tersebut masih memiliki teknologi yang rendah.

Selanjutnya pada literatur yang berjudul *“Driving Development? The Problems and Promises of the Car in Vietnam”* (Hansen, 2016) pemerintah

Vietnam mencoba mengembangkan industri otomotif bersama dengan investor asing agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada saat yang sama pemerintah Vietnam sendiri membatasi industri otomotif mereka untuk berkembang seperti pajak yang tinggi dan kurangnya koordinasi antar menteri dan pihak swasta seperti VAMA (*Vietnam Automobile Manufacturers*) sehingga menggambarkan lemahnya strategi pembangunan Vietnam hal ini membuat industri otomotif Vietnam tidak dapat bertahan dalam persaingan produsen di ASEAN.

Pada literatur-literatur di atas, memiliki persamaan yaitu membahas terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Vietnam. Kemudian membahas terkait perkembangan industri otomotif Indonesia berdasarkan pengaruh dan dominasi kelompok terhadap industri otomotif di Indonesia itu sendiri. Literatur di atas juga membahas terkait peluang yang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri komponen otomotif yang dimiliki dan membahas terkait industri otomotif, bahan baku karet, dan *agro based product* Indonesia merupakan sektor penggerak perekonomian ASEAN. Namun di sini industri otomotif Indonesia memiliki tingkat integrasi yang sedang untuk pasar otomotif pada pasar dunia. Sehingga industri otomotif Indonesia memiliki daya saing untuk produk-produknya hampir di seluruh negara ASEAN.

Selanjutnya literatur di atas juga membahas terkait pentingnya peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Vietnam. Sebab peningkatan kerja

sama ini memiliki arti penting bagi kedua negara. Selain itu, pada literatur di atas juga membahas terkait dampak dari perjanjian perdagangan ASEAN+6 tentang industri mobil Vietnam dan juga membahas terkait hadirnya MEA dalam kawasan ASEAN berdampak signifikan terhadap penstabilan ekonomi negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Sehingga Vietnam dan negara-negara ASEAN berupaya membangun pasar tunggal yang merupakan peluang bagi industri dalam membangun dan menjual produk industri termasuk otomotif. Dalam sektor otomotif yang ada di Vietnam menjelaskan bahwa industri otomotif Vietnam yang sedang dalam tahap upgrade teknologi yang mana dalam negerinya Vietnam telah memiliki industri dalam perakitan mobil dan memiliki OEM (*original equipment manufacturing*) untuk mobil keluaran negara mereka yang bermerk Thanh Cong dan Vinaxuki yang mana mobil ini dirakit bersama perusahaan swasta serta perusahaan pemerintah BUMN, namun juga dalam pengembangannya pemerintah Vietnam sendiri membatasi industri otomotif mereka untuk berkembang sehingga industri otomotif Vietnam tidak dapat bertahan dalam persaingan produsen di ASEAN.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan literatur-literatur di atas yaitu penelitian ini lebih membahas terkait strategi Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor mobil oleh pemerintahan Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo. Sebab menurut penulis, topik ini merupakan topik yang relevan dan belum banyak di bahas pada masa pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2017-2019.

Kemudian penulis juga mengambil momen pasca pemerintahan Vietnam mengeluarkan kebijakan baru mengenai dunia otomotif dalam ekspor-impor. Sehingga kajian ini akan menganalisis terkait bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor mobil oleh pemerintah Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo berdasarkan teori *Developmental State*.

Dengan demikian menurut penulis, akan memfokuskan peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan baru Vietnam tersebut agar tidak terjadi hambatan dalam industri otomotif. Selain itu, penelitian ini juga akan memfokuskan pembahasan terkait sebab dan alasan yang membuat pemerintahan Vietnam mengeluarkan kebijakan *Decree No.116/2017* yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 2018 bersamaan dengan diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Oleh karena itu, penulis akan membahas dengan menggunakan teori *Developmental State* dari Adrian Leftwich agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.

## **1.7 Landasan Teori**

### ***Developmental State***

Dalam pengerjaan skripsi ini penulis menggunakan Teori *Developmental State* yang di jelaskan oleh Adrian Leftwich dalam jurnal yang berjudul "*Bringing Politics Back in: Toward a model of the developmental state*", ia menjelaskan bahwa dalam pendekatan *Developmental State* merupakan pemahaman yang

melihat dari hasil-hasil pembangunan ekonomi dan memperlihatkan peran negara dalam proses pembangunan di wilayah Asia Timur, serta melakukan kerjasama terhadap sektor non-pemerintah. Dalam melakukan pembangunan negara merupakan prioritas utama bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, dan negara mempunyai peran yang sangat besar terhadap sektor swasta atau perusahaan non-pemerintah, selain itu pemerintah dapat mengatur institusi yang berpusat pada negara sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi ke dalam pasar yang dilakukan oleh aktor swasta dengan cara mengkoordinir, memberi petunjuk, mendisiplinkan dengan memanfaatkan instrumen politik. Pemerintah dalam melakukan pembangunan negara dapat melakukan campur tangan secara penuh terhadap pihak swasta khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga dapat menjalankan pasar dengan cepat dan ekonomi mudah dicapai.

Untuk mencapai tujuan pembangunan terhadap negara agar lebih cepat berkembang serta meningkatkan perekonomian, negara yang memiliki kekuatan politik dapat membantu perusahaan swasta dalam mengontrol jalannya pertumbuhan ekonomi dan menjalankan pasar yang terorganisir sehingga dalam pembangunan negara perekonomian lebih cepat berkembang karena pada dasarnya negara mengarahkan kebijakan untuk menjalankan dan mengontrol pasar serta pemerintah memiliki kekuatan untuk melancarkan kerjasama yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah (Leftwich, 1995).

Dalam teori *Developmental State* yang diutarakan oleh Adrian Leftwich terdapat 6 indikator untuk melihat bagaimana strategi tersebut berjalan, yang mana hal ini dilihat dari keberhasilan negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang yang dapat di sesuaikan untuk dipakai Indonesia dalam menjalankan strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan di sektor-sektor ekonomi tertentu melalui industri-industri yang ingin di tingkatkan sehingga mampu meningkatkan ekonomi seperti dalam industri otomotif, yaitu (Leftwich, 1995):

#### 1. The Developmental Elite

Dalam melakukan pembangunan negara kepala pemerintahan melakukan upaya-upaya atau intervensi untuk membantu negaranya dalam meningkatkan ekonomi dalam bidang-bidang tertentu, pemerintah juga memiliki keterkaitan erat dengan elit birokrasinya untuk bisa mengembangkan pembangunan negara dan budayanya. Seperti halnya di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak badan-badan tertentu untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara serta meningkatkan industri-industri andalan

Indonesia seperti dalam industri otomotif. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi juga tidak terlepas dari rangkaian bisnis dan perpolitikan dan adanya peran dua sisi dalam keterkaitan yang erat terhadap tokoh, pebisnis, partai, maupun *private sector* untuk memainkan peran politik dan ekonomi. Adanya hubungan tersebut merupakan ciri penting untuk

memiliki tujuan yang sama dalam melakukan pembangunan negara dan ekonomi.

## 2. Relative Autonomy of the Developmental State

Negara menjadi otonomi relatif bagi para elit dan lembaga negara yang mereka perintahkan untuk dapat melakukan pembangunan negara.

Otonomi relatif memberikan kewenangan pemerintah untuk mengatur ekonomi dan politik serta pemerintah dalam melakukan birokrasinya memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang ada dalam struktur pemerintahannya, dalam otonomi relatif menjelaskan bahwa pemerintah mampu menuntut kepentingan negara yang membuat adanya hubungan erat antara pemerintah dan aktor non negara serta negara lain. Sehingga mampu mengkoordinasi ekonomi dan melaksanakan tujuan pembangunan negara dengan adanya campur tangan politik dari pemerintahan untuk melakukan pembangunan negara dalam menjadikan negara tersebut semakin kuat dan menjadikan otonomi pembangunan terstruktur.

Contohnya dalam bidang industri otomotif Indonesia adanya badan pemerintah seperti menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri perhubungan dan GAIKINDO yang mengontrol industri otomotif Indonesia untuk memperlancar produktivitas serta meningkatkan teknologi dan menjual ke dalam pasar domestik maupun luar negeri. menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri perhubungan dan GAIKINDO juga dapat membantu pemerintah untuk dapat melancarkan

ekspor mobil dan melakukan mediasi terhadap negara lain ketika industri otomotif Indonesia terhambat seperti yang terjadi terhadap negara Vietnam dimana menteri perhubungan, menteri perdagangan, menteri perindustrian dan GAIKINDO melakukan proses tawar-menawar dengan wakil menteri industri dan perdagangan Vietnam, wakil menteri Vietnam, wakil menteri transportasi, ketua produksi mobil Vietnam VAMA (*Vietnam Automobile Manufacturers*), sehingga kebijakan yang nantinya disetujui akan menjadikan kesepakatan yang dianggap terbaik serta saling menguntungkan.

### 3. The Economic Bureaucracy: Power, Competence, Insulation and Penetration

Dalam melakukan pembangunan, negara harus menyadari betapa pentingnya pertumbuhan dan memodernisasi, pemerintah juga harus memiliki perencanaan pusat yang efektif. Dimana pemerintah harus bisa membuat strategi untuk dapat melakukan pembangunan di negaranya melalui lembaga yang terhubung dengan pemerintahan agar mampu mengatur perekonomian sehingga pemerintah juga dapat memfasilitasi pasar yang dilakukan oleh aktor swasta dan dapat memodernisasi negara.

Pemerintah juga harus mendukung perusahaan swasta secara penuh untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan perusahaan tersebut. contohnya terhadap industri otomotif Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat kebijakan-kebijakan yang



nantinya akan memperbesar pasar otomotif dalam negeri maupun ekspor melalui kementerian perindustrian, menteri perdagangan, menteri perhubungan dan GAIKINDO.

#### 4. Developmental States and Civil Society

Perkembangan disuatu negara juga tidak lepas dari konteks sosial-ekonomi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam keberhasilan melakukan pertumbuhan ekonomi negara dan promosi, tidak lepas dari munculnya masyarakat sipil secara aktif, masyarakat mampu merangsang tuntutan kepada pemerintah sehingga dapat membuat perkembangan negara seperti meningkatkan konsumsi domestik, penanaman modal dari investor, peningkatan pendidikan, dan memperluas lapangan pekerjaan, dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Namun pemerintah dalam meningkatkan ekonominya tidak mampu membangun ekonomi sendirian sehingga perlu adanya bantuan seperti sektor swasta dan menimbulkan kekuatan sosial-politik, sehingga GAIKINDO juga mampu merangsang pertumbuhan dan melindungi industri otomotif Indonesia, dan seperti kebijakan pemerintah terhadap industri otomotif dalam memprioritaskan mobil-mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan serta memiliki harga yang terjangkau bagi masyarakat, dan membantu masyarakatnya dalam meningkatkan pendidikan maupun lapangan pekerjaan.

## 5. Developmental States and Economic Interests

Strategi pembangunan dan hubungan antara pemerintah terhadap elit birokrasinya maupun pihak swasta, dimana kekuasaan pemerintah lebih memaksakan untuk dijalankan meskipun tidak sesuai dengan kepentingan dari aktor swasta sehingga pemerintah yang memiliki kekuatan politik mampu mempertegas kebijakan agar mampu mengatur, mendorong munculnya pertumbuhan ekonomi, ruang lingkup, fokus kegiatan, dan promosi dalam arah yang sesuai dengan strategi pembangunan yang merupakan pondasi dalam meningkatkan ekonomi meskipun merugikan aktor-aktor tersebut. Dalam kasus ini untuk dapat meningkatkan industri otomotif pemerintah memaksakan bagaimana industri otomotif dapat memenuhi persyaratan dan kelayakan produk seperti pengujian, administrasi, sertifikasi sebelum menjual produknya sehingga sesuai dengan standar internasional namun hal ini tidak menguntungkan bagi pengusaha karena akan menambah waktu pengiriman produk, maupun kenaikan harga produk sehingga kurang kompetitif

## 6. Developmental States: Civil Rights, Performance and Legitimacy

Dalam pengertian ini pemerintah dalam kebijakannya yang meliputi *Performance and Legitimacy* mampu menjaga industri yang ada di Indonesia agar mampu mendorong dan mempertahankan arus ekonomi sehingga peran pemerintah sangat penting untuk dapat menekankan kebijakan yang represif dan mampu dijalankan meskipun kebijakan

tersebut bersifat memaksa namun dalam legitimasinya memiliki ukuran yang luas dan kinerja yang berkelanjutan secara umum dalam membangun pemerintahan yang baik, pemerintah mampu melakukan pembangunan negara dan ekonomi meskipun adanya tantangan dari masyarakat.

pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan industri otomotifnya melakukan kebijakan seperti undang-undang terhadap investor asing agar dapat menjaga industri domestiknya bersaing dengan negara-negara lain bersama dengan elit birokrasinya seperti kementerian perindustrian dan GAIKINDO contohnya dalam melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia ketika adanya investor asing yang membuka pabrik di Indonesia peran pemerintah seperti menteri perindustrian dan GAIKINDO dapat mengkoordinir, dan mengontrol pabrik tersebut agar menjaga lingkungan Indonesia.

Dalam menjalankan proses penelitian ini melihat dari masalah ekspor Indonesia ke Vietnam pada sektor otomotif, diperlukan peran pemerintah Indonesia dalam membantu perusahaan swasta agar melancarkan kerjasama dengan negara Vietnam yang mana pemerintah Vietnam mengeluarkan kebijakan *Decree No.116/2017* dan *Circular No. 03/2018* sehingga menghambat ekspor otomotif ke negara Vietnam. Penulis melihat hal-hal apa saja yang melatar belakangi kebijakan yang di pilih oleh presiden Joko Widodo untuk menghadapi kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Vietnam mengenai *Decree*

*No.116/2017* dan *Circular No. 03/2018*. Untuk memahami proses kebijakan yang dikeluarkan oleh negara Vietnam terkait *Decree No.116/2017* dan *Circular No. 03/2018*, penulis menggunakan konsep *Developmental State* untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana strategi Indonesia menghadapi kebijakan tersebut agar kerjasama yang terjalin berjalan lancar kembali.

Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam mengenai larangan impor mobil yang telah diresmikan pada 1 Januari 2018 membuat Indonesia kehilangan pemasok dana dan kerugian yang sangat besar. Kebijakan Vietnam tersebut merupakan langkah besar bagi Vietnam sendiri untuk meningkatkan industri otomotif dalam negeri, namun bagi Indonesia hal ini justru membuat hilangnya pasar otomotif mereka sehingga membutuhkan langkah-langkah dalam pengambilan kebijakan untuk melihat bagaimana kesepakatan antara Indonesia-Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo tercapai.

Dalam kasus ini diperlukan pertimbangan dari kedua belah pihak serta proses tawar menawar pilihan sehingga memberikan kesepakatan yang terbaik, penulis ingin memahami lebih lanjut bagaimana kebijakan yang di tawarkan oleh Indonesia agar ekspor mobil mereka tidak terhambat. Penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor mobil oleh pemerintah Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Metode Kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di dalam suatu permasalahan untuk memiliki hasil deskriptif, permasalahan tersebut didasari pada data maupun temuan yang sudah didapat berupa sebuah opini. Untuk mendapatkan gambaran secara umum penelitian ini akan menggunakan analisis yang didasari dari teori *Developmental State* agar memandu jalannya penelitian melalui pengumpulan data dengan topik yang akan dibahas (Sugiarto, 2015, p. 8) Dalam menganalisis masalah dalam topik yang akan dibahas penulis akan mengumpulkan data-data untuk dibandingkan agar pembahasan lebih akurat.

### **2. Subjek Penelitian**

Dalam subjek penelitian ini akan meneliti strategi Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya dalam menangani kasus pelarangan impor mobil dari Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo, sebab kebijakan yang dikeluarkan oleh Vietnam merupakan ancaman bagi industri otomotif Indonesia dan memberikan efek yang cukup besar bagi perekonomian, belum banyak peneliti yang menyoroiti kasus ini sehingga pemilihan subjek

penelitian ini akan memudahkan penulis untuk mencari data dan menjawab permasalahan yang akan dibahas.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Metode pengambilan data ini akan menggunakan studi literatur karena penulis akan menggunakan data dengan sumber seperti Buku, Jurnal, maupun Artikel, website resmi, agar penelitian ini mendapatkan sumber referensi yang valid/terpercaya. Penelitian yang dibuat oleh penulis dapat mengkaji lebih dalam dan dapat memperoleh suatu kebenaran dan kepastian. Selain itu dalam proses pengumpulan data penulis akan melakukan penelusuran pustaka seperti ke perpustakaan yang ada di Yogyakarta, selain menggunakan studi Literatur penulis akan menggunakan data sekunder dengan pengumpulan data seperti internet dan dokumen agar mempermudah proses pengerjaan.

### **4. Proses Penelitian**

Proses penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan data yang telah dikumpulkan serta disiapkan untuk dianalisis dan akan dibuat menjadi subtopik dan di catat, subtopik tersebut akan dibaca dan dikembangkan secara keseluruhan lagi agar penelitian ini mendapatkan ide-ide yang lebih detail. Penelitian ini akan dituliskan dari berbagai sumber yang sudah dikembangkan serta permasalahan akan di gambarkan melalui subtopik yang telah disusun sesuai dengan topik yang dibahas, tujuan ini dimaksudkan agar

penulis lebih fokus serta menajamkan pembahasan yang akan di teliti sehingga memudahkan untuk melakukan penarikan kesimpulan.

